

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA TAHUN 2002-2019

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana

Ekonomi

disusun dan diajukan oleh:

**NANDARIMA SHASHA ISMI
A011171314**



kepada:

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA TAHUN 2002-2019

disusun dan di ajukan oleh :

NANDARIMA SHASHA ISMI
A011171314

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 20 Desember 2021

Pembimbing I



Muhammad Yusri Zamhuri, MA. Ph.D

NIP. 19610806 198903 1 004

ice
18/01/2022

Pembimbing II



Mirzalina Zaenal, SE, M. S.E

NIP. 19870111 201404 2 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Sanusi Fattah
Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si
NIP. 19690413 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA TAHUN 2002-2019

disusun dan diajukan oleh:

NANDARIMA SHASHA ISMI

A011171314

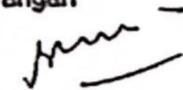
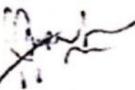
telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

pada tanggal 21 Februari 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

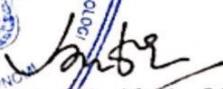
Menyetujui,

Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, M.A., PhD	Ketua	1. 
2.	Mirzalina Zaenal, SE., M.S.E	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Indraswati T.A Reviane, SE., MA., CWM®	Anggota	3. 
4.	Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si	Anggota	4. 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®
NIP. 19690413 199403 1003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Mahasiswa : Nandarima Shasha Ismi
Nomor Pokok : A011171314
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul ***Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia Tahun 2002-2019*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta orang lain. Apabila di kemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 21 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,



Nandarima Shasha Ismi

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, tiada kata yang pantas diucapkan selain puji syukur atas segala nikmat yang Allah SWT limpahkan pada seluruh hambanya. "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan". Maha benar Allah SWT atas segala firman-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada sebaik-baik suri tauladan yaitu Muhammad SAW, yang membawa manusia dari lembah kejahiliyaan menuju puncak kejayaan Islam.

Skripsi dengan judul "ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA TAHUN 2002-2019" disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Dalam proses penulisan skripsi ini, peneliti banyak mendapat dukungan, bantuan, dan masukan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Skripsi ini juga tak luput dari kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan karena keterbatasan dari peneliti.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat kepada yang terhormat kedua orangtua tersayang dan tercinta yang telah menjadi *support system* utama peneliti, untuk Ayahanda H. Ismi Anas dan Ibunda Hj. Kalsum Yunus, yang telah banyak mendoakan, mendidik, dan membesarkan peneliti dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang tanpa batas yang begitu besar dan nyata. Untuk almarhum papa, semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik untukmu di sisi-Nya, terima kasih atas segala perjuanganmu dalam menunjang pendidikan ku selama ini. Untuk mama, semoga Allah SWT senantiasa memberi kesehatan, menjaga, dan memberikan kemuliaan

atas semua jasamu dalam membesarkanku dengan sabar. Kepada kakakku, Apt. Desya Faradila, S.Si., M.Biomed yang telah memberi dorongan baik pikiran maupun materi serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan masa studi. Kepada adikku Amira Farisa yang telah menghibur di saat penulis sedang lelah. Kepada nenek yang senantiasa mendoakan dalam setiap langkah penulis, semoga nenek diberi umur yang panjang.

Pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Prof. Dr. Hj. Mahlia Muis, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., AK., CA. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, S.E., M.A., CWM® selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si., CSF., CWM® selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E., M.Si. selaku sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi. Terima kasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan hingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
4. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Bapak Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Mirzalina Zaenal, S.E., M.S.E selaku dosen pembimbing II. Terima kasih atas arahan, bimbingan, saran, dan waktu yang telah diberikan kepada peneliti viii selama penyusunan skripsi ini serta permohonan maaf yang sebesar-besarnya bilamana selama proses bimbingan skripsi peneliti secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang menyinggung perasaan Bapak

dan Ibu dosen pembimbing. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan Bapak dan Ibu dosen pembimbing.

5. Bapak Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, M.A., Ph.D. selaku penasihat akademik peneliti yang memberikan bantuan baik berupa arahan maupun motivasi selama menjalankan studi di Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
6. Dr. Indraswati Tri Abdi Reviane, S.E., MA., CWM® dan Dr. Sultan Suhab, S.E., M.Si selaku dosen penguji. Terima kasih telah memberikan motivasi dan saran bagi peneliti untuk terus belajar dan berusaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, dan nasihat kepada peneliti selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
8. Segenap Pegawai Akademik, Kemahasiswaan dan Perpustakaan E-Library Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Terima kasih Bapak dan Ibu atas segala bantuannya dalam hal pengurusan administrasi, persuratan, dan berkas yang diperlukan penulis.
9. Kepada *bestie* No Drop, yaitu: Ismi Novianti Rasyid, S.E., Annisya Amaliah Wirani, S.E, Nirwana Abdullah, S.E., Mar'atus Sholihah Amir, S.E, Nurhalisyia Halik, S.E, Irene Oriza Nathania *Darwin soon to be* S.E. *Thank you so much* karena hingga saat ini telah dan masih memberikan segenap bantuan baik itu arahan serta pemikiran yang sangat membantu peneliti serta terima kasih telah menemani perjalanan kuliah selama kurang lebih 4 tahun ini. Semangat terus semoga semua bisa sukses di jalannya masing-masing. Aamiin.

10. Teman-teman ERUDITE yang selalu memberikan semangat, dukungan, bantuan, dan doa. Semoga cita-cita dan impian kita dapat tercapai. Aamiin.
11. Keluarga besar HIMAJIE (Himpunan Jurusan Ilmu Ekonomi) yang peneliti tidak bisa sebutkan satu-satu. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini dan semoga tetap semangat.
12. *Best girl Seo Yea Ji. She helped me to get through some of my darkest days, the best fandom ever uri Yeyedom and also all of the talented PBIO A03 writers. Words will never describe how much joy you guys brought into my life. TYSM guys for keeping me entertained since I joined this amazing fandom. Cheers to more years together!<3*
13. Dan tentunya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satusatu, yang dengan tulus memberikan motivasi serta doa sehingga atas izin Allah Swt skripsi ini dapat terselesaikan. Terakhir, peneliti ingin menyampaikan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Jika terdapat kesalahan dalam skripsi ini, maka kesalahan tersebut sepenuhnya bersumber dari peneliti. Maka dari itu dibutuhkan kritik dan saran yang membangun agar lebih meminimalisir kesalahan dalam skripsi ini.

Makassar, 21 Februari 2022

Penulis,
NANDARIMA SHASHA ISMI

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA TAHUN 2002-2019

Nandarima Shasha Ismi
Yusri Zamhuri
Mirzalina Zaenal

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaruh produk domestik bruto, inflasi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan. Adapun data yang digunakan yaitu data *time series* tahun 2002 sampai 2019 dalam kuartal di setiap tahunnya dan dianalisis menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa produk domestik bruto dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia sedangkan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak, Produk Domestik Bruto, Inflasi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penulisan	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II.....	8
2.1. Landasan Teori.....	8
2.1.1. Kebijakan Fiskal	8
2.1.2. Pajak	9
2.1.3. Produk Domestik Bruto (PDB).....	14
2.1.4. Inflasi.....	15
2.1.5. Pengangguran.....	16
2.1.6. Kemiskinan.....	17
2.1.7. Keterkaitan Produk domestik bruto dengan penerimaan pajak 19	
2.1.8. Keterkaitan inflasi dengan penerimaan pajak.....	20
2.1.9. Keterkaitan tingkat kemiskinan dengan penerimaan pajak ..	21
2.1.10. Keterkaitan pengangguran dengan penerimaan pajak.....	22
2.2. Tinjauan Empiris	23
2.3. Kerangka Pikir Penelitian.....	27
2.4. Hipotesis Penelitian	28

BAB III.....	29
3.1. Ruang lingkup penelitian.....	29
3.2. Jenis dan sumber data.....	29
3.3. Metode pengumpulan data	29
3.4. Metode analisis.....	30
3.5. Definisi operasional	32
BAB IV	35
4.1. Gambaran umum wilayah penelitian.....	35
4.2. Perkembangan Umum Variabel Penelitian	36
4.2.1. Perkembangan produk domestik bruto di Indonesia	36
4.2.2. Perkembangan inflasi di Indonesia.....	39
4.2.3. Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia	43
4.2.4. Perkembangan Tingkat pengangguran di Indonesia.....	45
4.2.5. Perkembangan penerimaan pajak di Indonesia	49
4.3. Hasil estimasi variabel-variabel penelitian	54
4.4. Uji Asumsi Klasik	60
BAB V	65
5.1. Kesimpulan	65
5.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Hasil estimasi Produk Domestik Bruto (X1), Inflasi (X2), Tingkat Kemiskinan (X3), Tingkat Pengangguran (X4) terhadap Penerimaan Pajak (Y) Indonesia tahun 2002-2019	56
Tabel 4.2. Uji Normalitas Data	63
Tabel 4.3. Uji Autokorelasi	65
Tabel 4.4. Uji Multikoleniaritas	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara Indonesia Indonesia Tahun 2002-2019.....	2
Gambar 1.2. Persentasi Realisasi Penerimaan Pajak Terhadap APBN Indonesia Tahun 2002-2019	3
Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian	28
Gambar 4.1. Perkembangan Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2002-2019 Q to Q	39
Gambar 4.2. Perkembangan Inflasi Indonesia Tahun 2002-2019 Q to Q	42
Gambar 4.3. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2002-2019 Q to Q	46
Gambar 4.4. Perkembangan Tingkat Pengangguran Indonesia Tahun 2002-2019 Q to Q	48
Gambar 4.5. Perkembangan Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2002-2019 Q to Q	51
Gambar 4.6. Grafik normal P-P Plot	64
Gambar 4.7. Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional dilakukan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan suatu negara. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka pemerintah perlu meningkatkan sumber-sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan utama negara yaitu berasal dari pajak. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah seperti pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Simanjuntak & Mukhlis, 2012).

Dalam struktur APBN, komponen belanja negara terus mengalami lonjakan selama tiga dekade terakhir. Di tahun 2019, belanja negara tersebut menyentuh angka Rp. 2.309.287,3 Miliar. Belanja diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan perlindungan sosial. Semua dana untuk membiayai belanja negara yang terus meningkat ini berasal dari komponen pendapatan negara.

Pendapatan negara dalam APBN terbagi menjadi 2 yaitu penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.05/2007).

Gambar 1.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara Indonesia Tahun 2002 – 2019

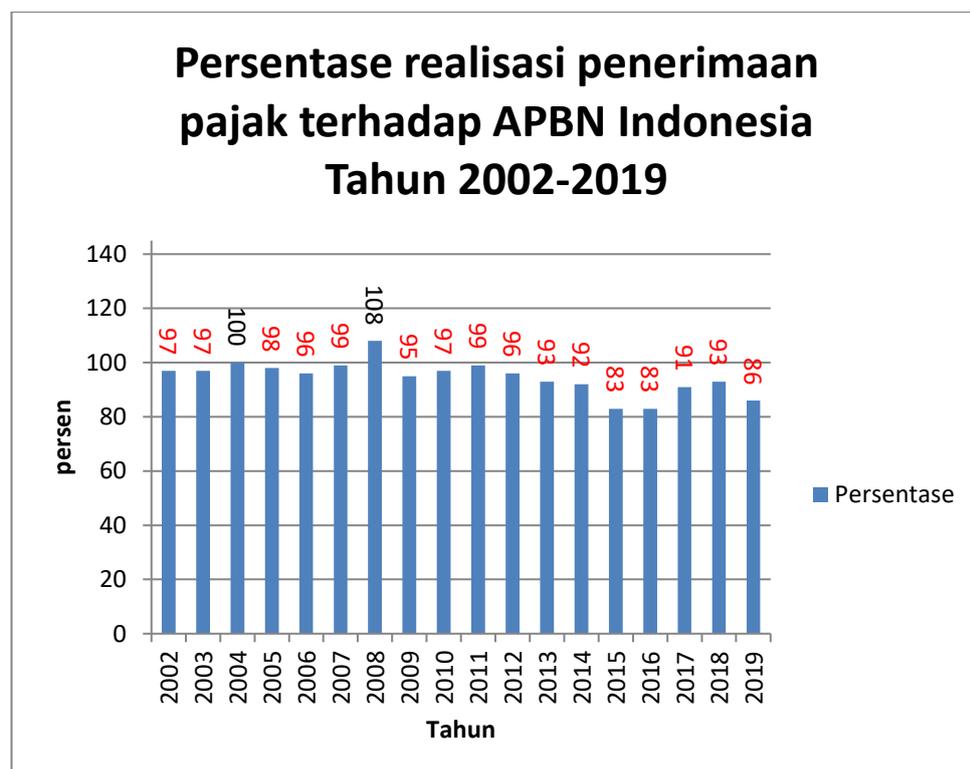


Sumber: Kementerian Keuangan (data diolah)

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan realisasi pendapatan negara Indonesia melalui penerimaan perpajakan dan PNBP. Dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan pajak dalam pendapatan negara jauh lebih besar dibanding kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber

penerimaan yang sangat penting bagi peningkatan kemandirian pembiayaan pembangunan negara. Selain itu dapat dilihat juga bahwa pendapatan negara melalui penerimaan perpajakan tahun 2000 hingga 2019 menunjukkan *trend* yang meningkat setiap tahunnya tetapi peningkatan ini tidak mengindikasikan bahwa kinerja pajak Indonesia sudah optimal.

Gambar 1.2 Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap APBN di Indonesia Tahun 2002 – 2019.



Sumber: Kementerian Keuangan (data diolah)

Gambar 1.2 menunjukkan persentase realisasi penerimaan pajak terhadap APBN di Indonesia tahun 2002 hingga 2019. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa persentase realisasi penerimaan

yang mencapai target dalam APBN hanya terjadi pada tahun 2004 dan 2008. Dalam kurun waktu 18 tahun terakhir, setidaknya ada 16 tahun yang tidak mencapai target APBN. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diartikan bahwa terdapat masalah dalam realisasi penerimaan perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi penerimaan perpajakan di Indonesia.

Besar kecilnya penerimaan pajak dipengaruhi oleh banyak faktor, namun yang paling utama dalam mempengaruhi masalah perpajakan suatu negara adalah faktor makroekonomi. Dalam sudut pandang makroekonomi, ada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi realisasi penerimaan perpajakan. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan 4 variabel makroekonomi yakni Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran.

Penerimaan perpajakan sangat erat kaitannya dengan PDB. Besarnya potensi perpajakan yang dipengaruhi oleh PDB merupakan gambaran kemampuan riil ekonomi masyarakat Indonesia. Dalam kondisi *ceteris paribus*, semakin tinggi jumlah PDB maka penerimaan perpajakan akan mengalami peningkatan. Jika terjadi peningkatan PDB maka semakin banyak penduduk yang penghasilannya melebihi pendapatan minimum sehingga hal ini dapat meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak (Rosalina, 2016).

Selain PDB, variabel makro lainnya yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia adalah inflasi. Jika harga barang dan jasa mengalami kenaikan terus menerus akan menyebabkan inflasi. Inflasi tersebut akan berdampak langsung pada kondisi perekonomian dan dapat menurunkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Sania et al., 2018).

Variabel makro lainnya yang juga dapat digunakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia adalah tingkat kemiskinan. Semakin tinggi tingkat kemiskinan mengindikasikan terjadinya penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat. Menurunnya pendapatan dan daya beli ini akan berdampak terhadap penerimaan negara dalam bentuk pajak. Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh antara tingkat kemiskinan dan penerimaan dalam suatu negara (Handoko et al., 2014).

Variabel makro terakhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran. Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat juga akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar masyarakat akan menurun (Sigit, 2018).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini akan membahas bagaimana pengaruh variabel makroekonomi yaitu PDB, inflasi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Apakah produk domestik bruto memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak di Indonesia tahun 2002-2019.
2. Apakah inflasi memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak di Indonesia tahun 2002-2019.
3. Apakah tingkat kemiskinan memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak di Indonesia tahun 2002-2019.
4. Apakah tingkat pengangguran memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak di Indonesia tahun 2002-2019.

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh produk domestik bruto terhadap penerimaan pajak di Indonesia tahun 2002-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak di Indonesia tahun 2002-2019.

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan terhadap penerimaan pajak di Indonesia tahun 2002-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap penerimaan pajak di Indonesia tahun 2002-2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan penerimaan pajak Indonesia.
2. Kalangan akademis dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk penulisan akan datang yang berkaitan dengan tema yang diangkat.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Kebijakan ini dilakukan untuk memperbaiki keadaan ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal juga dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan ini dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian negara menjadi lebih baik dengan cara mengubah sisi penerimaan ataupun sisi pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Rahayu, 2014).

Instrumen dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Pada dasarnya, kebijakan fiskal terbagi menjadi dua yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif (*expansionary fiscal policy*) adalah kebijakan yang menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak netto. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan

ekspansif dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi dan tingkat pengangguran yang tinggi. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif adalah suatu kebijakan dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak (Rahayu, 2014).

Ada 3 tujuan dari kebijakan fiskal menurut John F. Due (1968). Pertama, untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi. Kedua, untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran) dan menjaga kestabilan harga secara umum. Ketiga, untuk menstabilkan harga-harga barang secara umum khususnya mengatasi inflasi (Nurhalimah, 2017).

2.1.2. Pajak

2.1.2.1. Rasio Pajak (*tax ratio*)

Rasio pajak adalah perbandingan antara penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti: kebijakan perpajakan termasuk tarif pajak, efektivitas pemungutan pajak, berbagai insentif dan pengecualian pajak yang

diberikan kepada pelaku ekonomi dan masyarakat, serta kemungkinan terjadinya pidana pajak seperti penghindaran dan penggelapan pajak. Selain sebagai alat mengumpulkan penerimaan negara, pajak juga merupakan instrumen kebijakan fiskal untuk mengelola ekonomi (Kemenkeu, 2019).

Angka rasio pajak dapat naik atau turun seiring dengan kegiatan ekonomi yang diukur dengan PDB. Dalam kondisi ekonomi lesu dan mengalami tekanan seperti penurunan harga komoditas atau resesi ekonomi global, pemerintah suatu negara dapat memberikan stimulus ekonomi. Contoh stimulus yang dilakukan adalah dengan menurunkan tarif pajak atau memberikan insentif pengecualian pajak sehingga ekonomi dapat pulih dan bergairah kembali pertumbuhannya. Naik turunnya rasio pajak mencerminkan berbagai hal baik sebagai alat kebijakan fiskal maupun masalah struktural/ atau fundamental suatu perekonomian dan negara (KemenKeu, 2019).

2.1.2.2. Buoyancy Pajak (*Tax Buoyancy*)

Buoyancy pajak merupakan perbandingan persentase perubahan penerimaan pajak (termasuk

perubahan diskresioner) terhadap persentase perubahan pendapatan nasional. Dengan kata lain, buoyancy pajak adalah elastisitas penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang menunjukkan berapa persen perubahan penerimaan pajak apabila PDB berubah 1 persen. Nilai buoyancy pajak lebih kecil dari satu mengindikasikan elastisitas pajak yang rendah dan tidak efektifnya perubahan diskresioner, sedangkan nilai buoyancy pajak lebih besar dari satu mengindikasikan perubahan diskresioner meningkatkan penerimaan pajak. Konsep buoyancy ini berguna untuk mengetahui respon dari penerimaan pajak, baik untuk basis pajak dan perubahan kebijakan (Nurhidayati, 2017).

2.1.2.3. Rumus Pajak (*Tax Formula*)

Terhutangnya suatu pajak sekurang-kurangnya harus memenuhi unsur- unsur rumus pajak. Unsur- unsur pajak tersebut yakni adanya *tax base* atau dasar pengenaan pajak, *tax rate* atau tarif pajak dan adanya *tax-payer* atau wajib pajak. Rumus pajak dituliskan sebagai berikut:

Pajak = Pajak Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

$$(Tax = Rate \times Base)$$

Tarif pajak dikalikan dasar pengenaan pajak akan menghasilkan utang pajak atau *tax liability* (Safri, 2005).

2.1.2.4. Teori Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh suatu negara khususnya Indonesia didasarkan atas beberapa teori, antara lain:

1. Teori Asuransi

Menurut teori ini, negara bertugas melindungi orang dan/atau warganya dengan segala kepentingan, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa raga serta harta bendanya. Oleh karena itu, negara disamakan dengan perusahaan asuransi, di mana untuk mendapatkan perlindungan maka warga negara harus membayar pajak sebagai premi.

2. Teori kepentingan

Menurut teori ini, pembayaran pajak kepada negara didasarkan pada kepentingan individu yang diperoleh suatu negara. Oleh karena itu,

semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Menurut teori ini, pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar wajib pajak dengan memperhatikan besarnya penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja dari wajib pajak tersebut. Hal ini mengandung makna bahwa pajak haruslah dibayarkan sesuai dengan kemampuan individu. Seorang wajib pajak dikatakan mampu untuk membayar pajak kepada negara jika kebutuhan primer (biaya yang mendasar) untuk hidup telah terpenuhi.

4. Teori Bakti

Teori ini secara sederhana menyatakan bahwa warga negara membayar pajak karena baktinya kepada negara. Teori bakti disebut juga teori kewajiban mutlak. Menurut teori ini, negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak.

5. Teori Daya Beli

Teori yang menjadi dasar keadilan dalam pemungutan pajak menurut teori ini bukan kepentingan individu ataupun kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya. Teori ini menitik beratkan konsepnya pada fungsi kedua dari pemungutan pajak, yaitu fungsi mengatur (Thian, 2021).

2.1.3. Produk Domestik Bruto (PDB)

Menurut situs resmi BPS (Badan Pusat Statistik), Produk Domestik Bruto (PDB) menghitung hasil produksi suatu perekonomian tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor produksi tersebut. Semua faktor produksi yang berlokasi dalam perekonomian tersebut outputnya diperhitungkan dalam PDB. Akibatnya, PDB kurang memberikan gambaran tentang berapa sebenarnya output yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik perekonomian domestik.

Menurut Teori Peacock dan Wiseman (1961) masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Tingkat toleransi ini

merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Teori peacock dan Wiseman tersebut adalah pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya produk domestik bruto (PDB) menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar (Idris, 2018).

2.1.4. Inflasi

Menurut situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. (Ridha, 2019) menjelaskan bahwa inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/ komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas.

Menurut Putong (2009), Teori Keynes menyatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat hidup diluar batas

kemampuan ekonominya. Masyarakat fokus pada bagaimana perebutan rezeki antar golongan masyarakat dan bisa menimbulkan permintaan lebih besar dari jumlah barang yang tersedia. Implikasi dari teori ini adalah Keynes memiliki pandangan bahwa untuk menjamin perekonomian yang stabil diperlukan peranan pemerintah seperti mengendalikan kebijakan fiskal di bidang perpajakan (Pratama et al., 2016)

2.1.5. Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, ada 4 penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk yang menganggur. Pertama, mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. Kedua, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. Ketiga, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Keempat, mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Menurut teori klasik pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas. Hal ini dilakukan supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Jadi dalam teori klasik tersebut jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun. Hal tersebut mengakibatkan produksi

perusahaan menjadi turun sehingga permintaan tenaga kerja akan terus mengalami peningkatan karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh menjadi rendah (Prasetyo, 2017).

Namun, teori Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan teori klasik. Teori Keynes berpendapat masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah, sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun dan hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya, produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja (Marpaung, 2020).

2.1.6. Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan

Kuncoro (2006) menyatakan kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum (Macmud, 2016).

Terdapat dua paradigma atau teori besar (*grand theory*), yakni paradigma Neo-liberal dan Sosial Demokrasi.

1. Teori Paradigma Neo-Liberal

Kemiskinan merupakan permasalahan individu bukan permasalahan kelompok yang disebabkan oleh kelemahan atau pilihan hidup individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang apabila kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi ditingkatkan setinggi-tingginya. Dalam penanggulangan kemiskinan harus tidak bersifat sementara dan tidak hanya melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya masyarakat atau lembaga keagamaan.

2. Teori Paradigma Sosial Demokrat

Teori Sosial Demokrat kemiskinan bukan merupakan permasalahan individual, tetapi permasalahan struktural. Kemiskinan dikarenakan adanya ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat akibat dari terbatasnya akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber kemasyarakatan. Pada pendukung Sosial-Demokrat berpendapat bahwa kesetaraan

merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dalam kebebasan (Astuti, 2015).

2.1.7. Keterkaitan produk domestik bruto dengan penerimaan pajak

Salah satu variabel ekonomi makro yang dapat mempengaruhi fluktuasi penerimaan pajak adalah variabel pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi penerimaan pajak melalui nilai riil dari dasar pengenaan pajak dan pola konsumsi individu. Jika pertumbuhan ekonomi suatu negara meningkat, nilai riil dari dasar pengenaan pajak juga akan meningkat. Peningkatan nilai riil dari dasar pengenaan pajak akan menyebabkan pajak yang ditarik dari objek pajak tersebut meningkat, sehingga penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah juga akan meningkat (Wijayanti, 2015).

Penerimaan perpajakan sangat erat keterkaitannya dengan produk domestik bruto. Besarnya potensi perpajakan dipengaruhi oleh produk domestik bruto yang merupakan gambaran kemampuan riil ekonomi masyarakat Indonesia. Dalam kondisi *ceteris paribus*, pada saat produk domestik bruto meningkat maka penerimaan perpajakan akan mengalami peningkatan yang lebih besar. Peningkatan pendapatan per kapita akan selalu diikuti dengan peningkatan

kemampuan dalam membayar pajak, sehingga pada akhirnya akan menambah jumlah penerimaan perpajakan bagi negara (Rosalina, 2016).

Jumlah pajak yang dibayarkan tergantung pada tarif pajak dan pendapatan. Pendapatan tersebut dapat berubah sesuai dengan perubahan produk domestik bruto riil sehingga besarnya penerimaan pajak juga bergantung pada produk domestik bruto riil. Ketika produk domestik bruto riil mengalami peningkatan pada saat ekspansi, upah dan keuntungan juga akan meningkat, sehingga penerimaan pajak juga akan mengalami peningkatan. Begitupun sebaliknya, penurunan produk domestik bruto riil pada saat depresi akan menyebabkan upah dan keuntungan menurun. Penurunan upah dan keuntungan tersebut akhirnya akan berpengaruh terhadap penurunan penerimaan pajak dan tingkat awal pajak (Wijayanti, 2015).

2.1.8. Keterkaitan inflasi dengan penerimaan pajak

Jika terjadi kenaikan pada harga barang-barang yang ada akan membuat nilai mata uang semakin menurun dan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut serta dapat membuat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak menjadinya turun (Sania et al, 2018). Inflasi akan mengurangi daya beli uang yang telah diperoleh

masyarakat dengan susah payah. Apabila harga naik, tiap lembar uang yang dihasilkannya hanya akan mampu membeli barang dan jasa dalam jumlah yang sedikit. (Kusumo, 2011).

Inflasi mengakibatkan hasil penjualan akan menurun. Naiknya harga bahan baku menyebabkan naiknya harga jual bahan jadi. Harga jual yang terlalu tinggi menyebabkan masyarakat tidak tertarik untuk membeli barang/jasa tersebut sehingga pada akhirnya akan menurunkan penjualan. Terjadinya inflasi juga akan mengakibatkan menurunnya transaksi perekonomian yang pada akhirnya menyebabkan menurunnya penerimaan pajak (Sigit, 2018).

2.1.9. Keterkaitan tingkat kemiskinan dengan penerimaan pajak

Terdapatnya pengaruh yang signifikan antara tingkat kemiskinan terhadap penerimaan pajak mengindikasikan bahwa penerimaan pajak dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan di Indonesia. Ketika tingkat kemiskinan semakin meningkat, maka perekonomian menunjukkan semakin lemahnya daya beli. Melemahnya daya beli dan penghasilan ini akan berdampak terhadap penerimaan negara dalam bentuk pajak (Handoko et al., 2014).

Secara keseluruhan, kemiskinan menghambat pertumbuhan ekonomi melalui berbagai saluran, termasuk

misalnya, investasi yang lebih rendah dalam akumulasi modal manusia, alokasi sumber daya yang tidak efisien, konsumsi yang lebih rendah, dan produktivitas yang lebih rendah. Pada saat yang sama, semua faktor pertumbuhan ekonomi ini berkontribusi dalam menentukan luasnya basis pajak suatu negara (Besley & Persson, 2014). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa volatilitas kemiskinan akan menyebabkan volatilitas elemen basis pajak, dan akibatnya menyebabkan ketidakstabilan pendapatan pajak (Gnangnon, 2018).

2.1.10. Keterkaitan pengangguran dengan penerimaan pajak

Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Pengangguran yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kegiatan ekonomi pada akhirnya akan menyebabkan pendapatan pajak yang diperoleh pemerintah menjadi lebih sedikit. Orang yang menganggur tidak memiliki penghasilan (pendapatan), artinya semakin banyak orang yang menganggur maka akan semakin turun pula penerimaan negara yang diperoleh dari pajak penghasilan. Pengangguran menciptakan angka produktivitas sosial yang rendah yang akan menurunkan tingkat pendapatan masyarakat (Ishak, 2018).

Semakin banyak jumlah yang bekerja diharapkan mampu meningkatkan penjualan produk dan jasa. Jika hal tersebut terjadi maka akan menyebabkan keuntungan perusahaan bertambah. Saat permintaan akan produk dan jasa meningkat maka dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja sehingga banyak orang yang mempunyai penghasilan yang dapat meningkatkan penerimaan pajak negara (Sitinjak, 2016).

2.2. Tinjauan Empiris

(Handoko et al., 2014) dengan penelitian yang berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian dan penerimaan pajak di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda. Pada penelitian ini ditemukan bahwa variabel penerimaan pajak, konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor berpengaruh signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Variabel perekonomian, tingkat kemiskinan dan kebijakan perpajakan mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia secara signifikan.

(Wijayanti, 2015) dengan penelitian yang berjudul “analisis penerimaan pajak indonesia: pendekatan ekonomi makro”. Penelitian ini menggunakan metode model koreksi kesalahan. Pada penelitian ini ditemukan bahwa penerimaan pajak Indonesia

dipengaruhi oleh variabel PDB, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, dan belanja negara, sedangkan variabel inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak Indonesia dalam model jangka panjang. Pada model jangka pendek penerimaan pajak Indonesia hanya dipengaruhi oleh belanja negara, sedangkan variabel lainnya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Indonesia.

(Rosalina, 2016) dengan penelitian yang berjudul “Analisis pengaruh produk domestik bruto terhadap penerimaan pajak”. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda. Pada penelitian ini ditemukan bahwa persamaan regresi adalah $Y = -2,628 + 1,031X$ yang menunjukkan nilai murni variabel dependen tanpa dipengaruhi variabel independen adalah sebesar -2,628 atas Penerimaan Pajak dan kontribusi PDB sebesar 1,031 atas Penerimaan Pajak. Uji hipotesis menghasilkan t-hitung (46,183) yang lebih besar dibandingkan dengan t-tabel (2,086), maka H_A diterima, dan nilai probabilitas signifikannya berada di bawah 0,05, yaitu 0,000. Hasil analisis ini menunjukkan Produk Domestik Bruto berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

(Sitinjak, 2016) dengan penelitian yang berjudul “Dampak inflasi, pertumbuhan jumlah pekerja, dan pertumbuhan PDB terhadap penerimaan pajak”. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda. Pada penelitian ini ditemukan bahwa PDB

berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pusat, artinya semakin tinggi PDB maka penerimaan pajak semakin tinggi. Selain itu, kenaikan tingkat inflasi di Indonesia tidak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

(Gnangnon, 2018) dengan penelitian yang berjudul "*Effect of Poverty Volatility on Tax Revenue Instability in Developing Countries*". Analisis empiris telah dilakukan dengan menggunakan dataset panel tidak seimbang dari 112 negara berkembang yang mencakup periode 1980-2017 dengan metode *two-step system Generalized Method of Moments technique*. Ditemukan bahwa, rata-rata dalam sampel penuh volatilitas kemiskinan dikaitkan dengan penerimaan pajak yang rendah dan tidak stabil. Namun, hal ini mencerminkan efek yang berbeda di setiap negara, karena negara-negara berpenghasilan rendah cenderung mengalami efek ketidakstabilan pendapatan pajak yang positif dari ketidakstabilan kemiskinan, sementara ketidakstabilan kemiskinan menghasilkan ketidakstabilan pendapatan pajak yang lebih rendah di negara-negara yang relatif maju (di antara negara-negara berkembang).

(Sigit, 2018) dengan penelitian yang berjudul "Pengaruh variabel makroekonomi terhadap penerimaan pajak Indonesia tahun 1972-2017". Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda. Pada penelitian ini ditemukan bahwa variabel PDB dikeluarkan karena adanya multikolinearitas, Inflasi berpengaruh

negatif terhadap penerimaan pajak, dan nilai tukar dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

(Supriyanto, 2018) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh tingkat pengangguran terhadap pajak daerah di 8 kota pulau Kalimantan”. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda. Pada penelitian ini ditemukan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh namun tidak signifikan terhadap pajak daerah di 8 kota Pulau Kalimantan pada periode 2010-2015.

(Muttaqin & Halim, 2020) dengan penelitian yang berjudul “*The Effect of Economic Growth and Inflation on Tax Revenue*”. Penelitian ini menggunakan metode data analisis kuantitatif dengan melakukan regresi data panel. Dari hasil uji hipotesis diketahui bahwa variabel PDB/Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

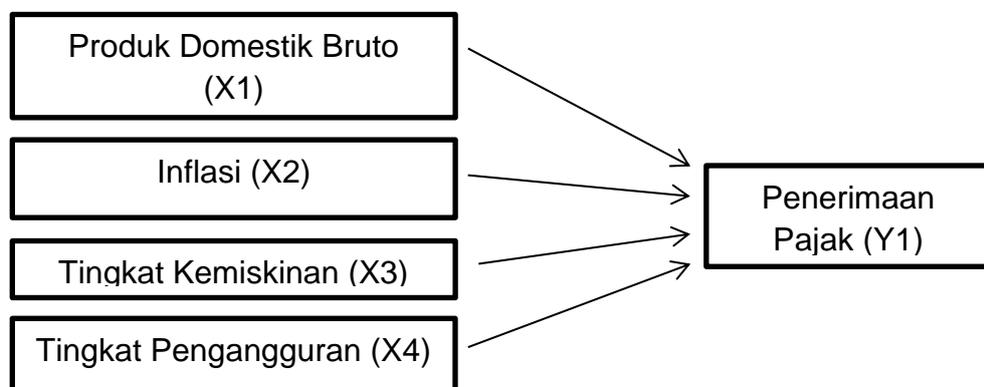
(Kusmono, 2011) dengan penelitian yang berjudul “Analisis determinan penerimaan pajak di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel PDB, Inflasi, suku bunga SBI dan deltaWP secara bersama-sama mampu mempengaruhi penerimaan pajak Indonesia. PDB dan pertambahan wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak, sedangkan

inflasi dan suku bunga SBI mempunyai pengaruh yang negatif terhadap penerimaan pajak Indonesia. Semua variabel bebas signifikan secara statistik dan sesuai hipotesis.

2.3. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian analisis pengaruh variabel makroekonomi terhadap penerimaan pajak di Indonesia tahun 2002-2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah (1) produk domestik bruto, (2) inflasi, (3) tingkat kemiskinan, (4) tingkat pengangguran. Variabel-variabel tersebut digunakan agar peneliti lebih terarah dalam menemukan data dan informasi dalam penelitian ini agar dapat memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Dari pemaparan tersebut maka dapat dibuat kerangka konseptual penelitian sebagaimana pada gambar berikut

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian



2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir tersebut , maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Produk domestik bruto diduga berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak Indonesia tahun 2002-2019.
2. Inflasi diduga berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak Indonesia tahun 2002-2019.
3. Tingkat Kemiskinan diduga berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak Indonesia tahun 2002-2019.
4. Pengangguran diduga berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak tahun 2002-2019.